

Koneksi global dari Bandung: youth forum sebagai pilar baru paradiplomasi kota

Global connections from Bandung: youth forum as a new pillar of city paradiplomacy

Windy Dermawan^{a,1*}, Ilham Shidqi Nurrahmad^{b2}, RMT Nurhasan Affandi^{c,3}

^{a,b,c} Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Provinsi Jawa Barat

¹windy.dermawan@unpad.ac.id; ²ilhamnurrahmadi@gmail.com; ³rmthiunpad@gmail.com

*windy.dermawan@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam mendukung pelaksanaan paradiplomasi Kota Bandung melalui Bandung Sister Cities (Basic) Youth Forum, khususnya dalam hubungan kota saudara Bandung-Braunschweig. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, penelusuran daring, serta telaah dokumen, dan diverifikasi melalui teknik triangulasi. Riset ini berlandaskan pada teori partisipasi oleh Cohen & Uphoff (1977) dan model tangga partisipasi Roger Hart (1992), serta konsep paradiplomasi dari Kuznetsov dan Tavares. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Basic Youth Forum diklasifikasikan sebagai *participation in implementation*, di mana pemuda terlibat dalam pelaksanaan teknis kegiatan paradiplomasi, namun belum dalam tahap perencanaan atau evaluasi kebijakan. Tingkat partisipasi berada pada kategori *adult-initiated, shared decisions with youth*, yaitu inisiatif berasal dari aktor dewasa (dinas pemerintah), namun melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan struktur partisipatif dalam paradiplomasi daerah, termasuk penyusunan *work plan* konkret agar keterlibatan pemuda tidak bersifat simbolis. Dengan demikian, Basic Youth Forum berpotensi menjadi pilar strategis dalam diplomasi kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bandung, Basic Youth Forum, Paradiplomasi, Partisipasi, Pemuda.

Abstract

This research aims to analyze the forms and levels of youth participation in supporting the implementation of paradiplomacy in the City of Bandung through the Bandung Sister Cities (Basic) Youth Forum, particularly in the sister city relationship between Bandung and Braunschweig. Using a descriptive-analytical qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, online searches, and document reviews, and verified through triangulation techniques. This research is based on the participation theory by Cohen & Uphoff (1977) and Roger Hart's ladder of participation model (1992), as well as the concept of paradiplomacy by Kuznetsov and Tavares. The research results show that the participation of the Basic Youth Forum is classified as participation in implementation, where the youth are involved in the technical execution of paradiplomacy activities, but not yet in the planning or policy evaluation stages. The level of participation falls into the category of adult-initiated, shared decisions with youth, meaning the initiative comes from adult actors (government agencies), but involves youth in the decision-making process of activity implementation. These findings underscore the importance of strengthening participatory structures in regional paradiplomacy, including the formulation of concrete work plans to ensure that youth involvement is not merely symbolic. Thus, the Basic Youth Forum has the potential to become a strategic pillar in more inclusive and sustainable city diplomacy.

Keywords: Bandung, Basic Youth Forum, Youth, Paradiplomacy, Participation

1. Pendahuluan

Hubungan internasional dewasa ini tidak hanya dimonopoli oleh negara dan aktor-aktor pemerintah pusat, melainkan juga mulai melibatkan entitas subnasional seperti pemerintah daerah dan komunitas lokal. Konsep paradiplomasi, yakni pelibatan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri, menjadi mekanisme strategis untuk memperluas jaringan internasional sekaligus memperkuat identitas dan potensi lokal (Kuznetsov, 2015). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan paradiplomasi dimungkinkan oleh sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sebagian urusan luar negerinya. Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar dan progresif di Indonesia, menjadi contoh menarik dalam pelaksanaan paradiplomasi melalui program *sister city*—khususnya dengan Kota Braunschweig, Jerman, sejak tahun 1960 (Fahri, 2018). Namun demikian, hubungan antara Bandung dan Braunschweig sempat mengalami kemandekan karena kurangnya sosialisasi serta partisipasi publik, yang menjadikan relasi tersebut lebih bersifat seremonial daripada substantif (Fahri, 2018). Padahal, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 21 Ayat 2, hubungan luar negeri daerah harus mendorong penguatan hubungan antarmasyarakat, termasuk pelibatan pemuda sebagai bagian dari komunitas yang strategis.

Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2017 dibentuk *Bandung Sister Cities (Basic) Youth Forum*, sebuah forum kepemudaan yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sebagai wadah untuk memperkuat keterlibatan pemuda dalam relasi antar-kota di tingkat internasional. Forum ini ditujukan bagi pemuda dengan kemampuan bahasa asing dan ketertarikan terhadap kerja sama internasional, dan secara khusus bertujuan menjalin komunikasi dengan pemuda dari kota-kota mitra Bandung, salah satunya Braunschweig (Basic Youth Forum, 2018; Husna, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi pemuda yang tergabung dalam *Basic Youth Forum* dalam pelaksanaan paradiplomasi Kota Bandung terhadap Kota Braunschweig. Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi Cohen dan Uphoff (dalam Rizqina, 2010) dan model *ladder of participation* dari Roger A. Hart (1992), studi ini mencoba menilai sejauh mana forum ini mampu melampaui keterlibatan simbolis dan mencapai bentuk partisipasi substantif yang bersifat kolaboratif dan strategis.

Dari sisi urgensitas, penelitian ini ingin menegaskan bahwa pemuda bukan sekadar objek dari kebijakan luar negeri daerah, melainkan subjek yang memiliki kapasitas dan daya inovatif untuk mendorong agenda-agenda globalisasi lokal (*glocalization*). Sayangnya, sejauh ini studi mengenai keterlibatan pemuda dalam paradiplomasi masih sangat terbatas. Beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh Lestari (2016), Kasila dan Kolopaking (2018), serta Prasaja (2018), memang membahas partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Namun, belum ada kajian mendalam yang secara spesifik mengangkat peran organisasi kepemudaan dalam hubungan luar negeri daerah.

Dalam ranah kajian paradiplomasi, sejumlah penelitian terdahulu (Nganje, 2014; Liu & Song, 2020; Raš, 2021; Oddone, 2023) menekankan pentingnya hubungan antara desentralisasi, demokratisasi, dan peningkatan partisipasi lokal. Studi lain menyoroti motivasi dan strategi aktor subnasional dalam melaksanakan paradiplomasi, termasuk praktik-praktik diplomasi oleh entitas non-negara seperti lembaga pendidikan dan komunitas (Cohn & Smith, 1996; Keating, 2013). Sinaga (2010) dan Windiani (2013) menunjukkan praktek paradiplomasi dalam lingkup kerangka kebijakan luar negeri Indonesia. Selanjutnya, Fitriyah dan Rani (2013), Annisa (2017), dan E.N. Domloboy NST (2016) menunjukkan hubungan luar negeri daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam beragam aspek. Namun belum ada riset yang secara spesifik menempatkan organisasi pemuda sebagai pilar baru dalam praktik paradiplomasi kota.

Oleh karena itu, kebaruan riset ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut, dengan menjadikan *Basic Youth Forum* sebagai studi kasus utama. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat interpretatif dan kualitatif, untuk menggali secara mendalam makna sosial dan proses di balik pelibatan pemuda dalam paradiplomasi Kota Bandung. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, riset berbasis internet, serta analisis dokumen arsip (Ernanda, 2020; Aldzaky, 2020). Dengan menganalisis partisipasi pemuda dalam konteks hubungan luar negeri daerah, penelitian ini juga ingin menegaskan bahwa diplomasi kota tidak hanya soal kesepakatan antarwalikota, tetapi juga

tentang kolaborasi lintas generasi dan inklusi komunitas dalam membangun koneksi global yang berkelanjutan dan bermakna.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif untuk memahami secara mendalam bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam mendukung paradiplomasi Kota Bandung melalui *Bandung Sister Cities (Basic) Youth Forum*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, makna sosial, serta dinamika interaksi antara pemuda dan institusi pemerintah dalam konteks hubungan luar negeri daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti anggota Basic Youth Forum, pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung. Kedua, riset arsip dan dokumen meliputi analisis MoU Bandung-Braunschweig, dokumen peraturan daerah, laporan kegiatan, serta dokumen program kerja instansi terkait. Ketiga, riset berbasis internet digunakan untuk mengakses informasi dari situs resmi pemerintah, media sosial, serta pemberitaan daring terkait kegiatan paradiplomasi dan kepemudaan.

Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan sumber daring. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai sudut pandang (Ernanda, 2020; Aldzaky, 2020). Adapun analisis data dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola narasi yang berhubungan dengan bentuk dan tingkat partisipasi pemuda. Proses ini dilakukan secara bertahap sejak pengumpulan data hingga penyusunan temuan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis mengacu pada teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff yang membagi partisipasi ke dalam empat bentuk utama—yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, manfaat, dan evaluasi. Selain itu, digunakan pula kerangka *ladder of youth participation* dari Roger A. Hart (1992) untuk menilai tingkat kedalaman partisipasi pemuda, dari level non-partisipatif seperti simbolik dan tokenistik hingga level partisipatif seperti inisiatif kolaboratif dengan aktor dewasa. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berupaya menggambarkan secara deskriptif perilaku pemuda dalam kegiatan paradiplomasi Kota Bandung, tetapi juga menganalisis bagaimana keterlibatan tersebut bermakna bagi penguatan kapasitas diplomasi daerah, serta sejauh mana partisipasi pemuda dapat berkembang dari sekadar pelengkap acara menjadi aktor substantif dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama internasional Kota Bandung.

3. Hasil dan Pembahasan

Paradiplomasi Kota Bandung terhadap Kota Braunschweig

Terhitung sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung telah mengadakan pertemuan mengenai hubungan Bandung dan Braunschweig sebanyak empat kali. Meski begitu, periset mengalami tantangan dalam mendapatkan detail dan hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut. Dalam hal komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Kota Braunschweig, menurut Nadia Adelliani Ernanda, Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung, frekuensi dari komunikasi antara kedua kota bergantung kepada keperluan (Ernanda, 2020). Saat ini, karena kedua kota sedang fokus dalam persiapan perayaan peringatan 60 tahun hubungan Bandung dan Braunschweig di masing-masing kota, komunikasi yang dijalankan bisa mencapai lebih dari 2 kali dalam seminggu. Sementara, jika tidak ada agenda dalam waktu dekat, komunikasi hanya dilakukan sebanyak 1 kali dalam rentang 3 hingga 5 bulan. Komunikasi tersebut dijalankan melalui beberapa medium seperti surat fisik resmi, surat elektronik ataupun melalui aplikasi WhatsApp (Ernanda, 2020).

Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Braunschweig merayakan hubungan 60 tahun hubungan Bandung dan Braunschweig pada tahun 2020 di masing-masing kota. Di Kota Braunschweig, peringatan 60 tahun hubungan Bandung-Braunschweig diisi dengan berbagai kegiatan seperti penampilan di bidang teknologi, perdagangan, ekonomi, kuliner, budaya dan sebagainya (Humas Kota Bandung, 2019). Selain itu, Pemerintah Kota Braunschweig juga berencana untuk memberikan nama salah satu jembatan di Kota Braunschweig dengan nama ‘Bandung’. Hal tersebut disampaikan oleh Pemerintah Kota Braunschweig pada kunjungan Pemerintah Kota Bandung ke Kota Braunschweig pada 20-26 Juni 2019 lalu (Bagian Kerjasama Kota Bandung, 2019).

Sementara untuk perayaan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung sempat merencanakan perayaan peringatan hubungan 60 tahun Bandung dan Braunschweig pada bulan September 2020. Salah satu rangkaian perayaan peringatan Bandung dan Braunschweig yang ke-60 tahun di Kota Bandung direncanakan untuk dilakukan di gedung Gelanggang Generasi Muda yang saat ini sedang direnovasi. Alasan pemilihan Gedung Gelanggang Generasi Muda sebagai tempat pelaksanaan tidak terlepas dari sejarah Gedung Gelanggang Generasi Muda yang dahulu dibangun berkat bantuan dari Pemerintah Kota Braunschweig (Ernanda, 2020). Dalam pelaksanaan perayaan tersebut, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri sebagai fasilitator dari hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung akan melibatkan dinas-dinas terkait, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung (Ernanda, 2020).

Perhelatan perayaan 60 tahun Bandung dan Braunschweig tersebut juga direncanakan untuk dibarengi dengan penandatanganan MoU baru antara Pemerintah Kota Bandung dan Kota Braunschweig. Alasannya, karena Pemerintah Kota Bandung menginginkan implementasi yang lebih terarah dari MoU antara Kota Bandung dan Braunschweig (Ernanda, 2020). Saat ini Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri Bandung dan Braunschweig. Evaluasi tersebut melibatkan akademisi dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Ernanda, 2020).

Hasil dari evaluasi tersebut dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun MoU baru antara kedua kota. Serta dijadikan acuan bagi pelaksanaan program di antara kedua kota di masa depan. Menurut Nadia Adelliani Ernanda, Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung, hal tersebut telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Pemerintah Kota Braunschweig (Ernanda, 2020).

Temuan ilmiah utama dalam subbagian ini adalah bahwa paradiplomasi yang dilakukan Kota Bandung terhadap Kota Braunschweig cenderung bersifat *ceremonial* (Tavares, 2016), meskipun memiliki dimensi historis dan potensi substansial untuk dikembangkan. Ini dibuktikan dengan ketiadaan *work plan* yang konkret dalam implementasi Memorandum of Understanding (MoU) dan *Minutes of Meeting* (MoM). Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kerja sama antar kedua kota, terutama dalam bidang kepemudaan, tidak memiliki arah yang strategis dan terukur. Penyebab utamanya adalah pendekatan top-down dari birokrasi daerah yang belum melibatkan struktur masyarakat sipil secara optimal, termasuk organisasi kepemudaan seperti Basic Youth Forum.

Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan paradoks antara intensi formal paradiplomasi yang mengarah pada penguatan hubungan internasional daerah dengan kenyataan implementasi yang masih dominan seremonial. Hal ini relevan dengan klasifikasi Tavares (2016) mengenai empat bentuk paradiplomasi, di mana *ceremonial paradiplomacy* umumnya ditandai oleh simbolisme, peringatan tahunan, dan minimnya tindak lanjut kebijakan.

Dibandingkan dengan kota-kota yang memiliki *plan of action* yang rinci seperti Hamamatsu dan Kawasaki dalam kerja sama lingkungan dengan Bandung, relasi Bandung-Braunschweig justru menunjukkan stagnasi akibat ketiadaan indikator keberhasilan dan pengawasan. Keberadaan *work plan* dapat menjadi penentu efektivitas program, karena mendefinisikan ruang lingkup kerja sama, membagi peran secara terukur antar aktor, serta memungkinkan proses evaluasi yang terstandar. Tanpa ini, hubungan paradiplomatik akan sulit untuk menjangkau hasil-hasil yang dapat diukur.

Penelitian Liu & Song (2020) menyebutkan bahwa salah satu prasyarat keberhasilan paradiplomasi adalah integrasi kelembagaan antara aktor birokrasi dan komunitas lokal. Namun dalam kasus ini, walaupun sudah ada struktur yang potensial yaitu Basic Youth Forum, absennya kebijakan pengarusutamaan pemuda menyebabkan peran mereka belum optimal. Ini memperkuat temuan Raş (2021) bahwa keberhasilan paradiplomasi juga sangat tergantung pada political will serta kemampuan kelembagaan lokal untuk melakukan desentralisasi diplomatik secara partisipatif. Dalam konteks Bandung, absennya mekanisme institusional yang menjamin keberlanjutan pelibatan BYF menjadi hambatan utama menuju praktik diplomasi kota yang substantif dan inklusif.

Jenis Partisipasi Basic Youth Forum dalam Paradiplomasi Bandung terhadap Braunschweig

Berdasarkan teori Cohen & Uphoff (1977), partisipasi terbagi dalam pengambilan keputusan, implementasi, manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Basic

Youth Forum hanya mencapai level *participation in implementation*, yakni keterlibatan dalam pelaksanaan teknis kegiatan, seperti perayaan hubungan 59 tahun Bandung-Braunschweig dan pendampingan mahasiswa HBK Braunschweig. Temuan ini menandakan adanya ketimpangan antara kapasitas dan ruang partisipasi yang tersedia. Meskipun para anggota BYF memiliki kemampuan bahasa asing dan pemahaman mengenai diplomasi kultural, mereka belum diberikan kewenangan dalam tahap-tahap penting lainnya seperti perencanaan kebijakan (decision-making) atau evaluasi. Ini berbanding lurus dengan model "tokenistic participation" menurut Hart (1992), di mana pemuda hanya dilibatkan untuk formalitas. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh pendekatan *institutional lock-in*, di mana birokrasi pemerintah cenderung mempertahankan status quo demi efisiensi administratif. Padahal, dari perspektif *empowerment theory*, bentuk partisipasi yang ideal adalah yang memberikan ruang bagi komunitas (dalam hal ini pemuda) untuk ikut menentukan arah program secara substansial (Goulet, 1989).

Bandingkan dengan studi Prasaja (2018) dan Lestari (2016) yang mengangkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, BYF menunjukkan bentuk partisipasi yang unik karena berada dalam domain hubungan internasional lokal. Namun, belum ada regulasi atau kebijakan yang mengakomodasi BYF secara formal sebagai aktor paradiplomasi. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menetapkan *legal framework* yang mengatur posisi BYF secara jelas dalam sistem tata kelola hubungan luar negeri daerah. Lebih lanjut, partisipasi BYF dalam pelaksanaan teknis memperlihatkan potensi transformatif jika didukung oleh mekanisme tata kelola yang memungkinkan pembelajaran organisasi (organizational learning), partisipasi lintas sektor (multi-stakeholder governance), dan dukungan politik yang konsisten dari pemerintah daerah. Tanpa itu, keterlibatan mereka berisiko stagnan dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat dan mitra internasional.

Level Partisipasi Basic Youth Forum dalam Paradiplomasi Bandung terhadap Braunschweig

Mengacu pada model tangga partisipasi Roger Hart (1992), tingkat partisipasi Basic Youth Forum dikategorikan sebagai *adult-initiated, shared decisions with youth*, yaitu inisiatif berasal dari aktor dewasa (pemerintah), tetapi melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan implementatif. Ini adalah level partisipasi yang relatif tinggi namun belum optimal, karena belum mencapai tingkat *youth-initiated and directed* atau *youth-initiated, shared decisions with adults*.

Secara teoretik, hal ini menunjukkan bahwa Basic Youth Forum berada dalam posisi semi-substansial: mereka diakui dan dilibatkan, tetapi belum menjadi pengambil keputusan mandiri. Hal ini bisa dipahami dari ketergantungan BYF terhadap sumber daya dan struktur legal pemerintah daerah. Dalam kondisi ini, partisipasi mereka sangat ditentukan oleh political will dan alokasi anggaran. Secara empirik, potensi partisipasi BYF dapat dikembangkan lebih lanjut melalui reformulasi kebijakan yang memungkinkan mereka menjadi mitra strategis, bukan sekadar pelaksana teknis. Sebagai contoh, Sister Cities Conference yang dirancang tetapi gagal dilaksanakan menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif bersama, kurangnya dukungan struktural membuat partisipasi tetap terhenti di level implementasi.

Sebagai banding, model *youth-based city diplomacy* seperti yang dikembangkan di Barcelona atau Seoul memberikan ruang bagi pemuda untuk merumuskan agenda dan melakukan diplomasi kota secara langsung. Dalam kasus Seoul, pemerintah kota bahkan membentuk Youth International Cooperation Center untuk mendukung keterlibatan generasi muda dalam kerja sama global yang konkret, dengan agenda yang dirumuskan bersama oleh pemuda dan pejabat kota. Ini menunjukkan pentingnya *deliberative space* sebagai arena dialog dan perumusan kebijakan bersama antara pemerintah dan komunitas pemuda (Dryzek, 2000). Konteks ini menunjukkan bahwa partisipasi strategis pemuda dalam paradiplomasi tidak hanya mungkin, tetapi juga perlu ditopang oleh struktur kelembagaan yang visioner dan adaptif, serta didukung oleh kepemimpinan birokrasi yang inklusif dan progresif.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi pemuda dalam paradiplomasi Kota Bandung terhadap Kota Braunschweig masih terbatas pada aspek implementasi dan belum mencapai partisipasi penuh. Paradiplomasi yang dilakukan masih bersifat *ceremonial* dan belum ditopang oleh kebijakan atau *plan of action* yang konkret. Padahal, keterlibatan pemuda seperti dalam Basic Youth Forum memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan pendorong diplomasi kota yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan

kerangka regulatif, kelembagaan, dan anggaran menjadi prasyarat untuk menjadikan BYF sebagai aktor strategis dalam hubungan internasional daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Bandung dapat menegaskan posisinya sebagai pelopor diplomasi kota berbasis pemuda di Indonesia, dan menjadikan Basic Youth Forum bukan hanya simbol, tetapi subjek aktif dalam membangun koneksi global dari akar lokal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Basic Youth Forum (BYF) dalam paradiplomasi Kota Bandung terhadap Kota Braunschweig masih terbatas pada tingkat partisipasi implementatif. Meskipun BYF memiliki potensi strategis sebagai penggerak diplomasi kota yang inklusif, keterlibatan mereka belum menyentuh aspek pengambilan keputusan, evaluasi, ataupun perumusan kebijakan. Keterbatasan ini terjadi karena pendekatan birokratis yang bersifat top-down, absennya rencana kerja (work plan), dan belum adanya pengakuan formal terhadap BYF sebagai aktor paradiplomasi dalam kerangka hukum dan kelembagaan Pemerintah Kota Bandung. Padahal, pemuda yang tergabung dalam BYF memiliki kapasitas linguistik, budaya, dan jaringan sosial yang mendukung peran mereka dalam hubungan internasional berbasis komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi Kota Bandung cenderung masih bersifat seremonial, sebagaimana dikategorikan oleh Tavares, dan belum berkembang ke arah bentuk kolaboratif yang berbasis tujuan strategis. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Seoul atau Barcelona yang telah membentuk ruang partisipatif khusus bagi pemuda, maka Bandung masih memiliki pekerjaan rumah dalam membangun sistem tata kelola paradiplomasi yang lebih partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pelembagaan peran BYF melalui agenda bersama seperti pembentukan Youth Desk dan penyusunan Agenda Pemuda untuk Diplomasi Kota. Inisiatif ini dapat menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa partisipasi pemuda dalam paradiplomasi bukan hanya simbolik, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

5. Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika 4.1*.
- Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy In Action The Foreign Relations of Subnational Governments*. New York: Routledge.
- Aldzaky, Y. S. (2020, Maret 11). Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Basic Youth Forum. (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)
- Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of American Planning, Vol. 35, No.4*, 216-224.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2018). *Bandung Dalam Angka*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Bagian Kerjasama Kota Bandung. (2013). Sister City Bandung. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bagian Kerjasama Kota Bandung. (2019, Juni 28). *Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Bandung Ke Jerman 2019*. Retrieved from Bagian Kerjasama Kota Bandung: <http://kerjasama.bandung.go.id/2019/06/28/kunjungan-delegasi-pemerintah-kota-bandung-ke-jerman-2019>
- Bagian Kerjasama Kota Bandung. (n.d.). *Sister City*. Retrieved from <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>
- Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Bandung. (2016). *Sister City Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Basic Youth Forum. (2018). *Profil Organisasi*. Bandung: Basic Youth Forum.
- Cohn, T. H., & Smith, P. J. (1996). Subnational Governments as International Actors Constituent Diplomacy in British Columbia and the Pacific Northwest. *BC Studies, no. 110*, 25-45.
- Ernanda, N. A. (2020, Februari 25). Hubungan Bandung dan Braunschweig . (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)

- Fadillah, M. F. (2017). Implementasi Paradiplomasi Kota Bandung Terhadap Kota Braunschweig Di Kepemimpinan Ridwan Kamil Sebagai Walikota Bandung. *Undergraduate Thesis (S1) Universitas Padjadajaran.*
- Fahri, M. (2018). Dinamika Kerjasama Kota Bandung-Braunschweig dalam Kerangka Sister City. Undergraduate (S1) Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Goulet, D. (1989). Participation in development: New avenues.. *World Development, 17(2)*, 165-178.
- Hart, R. (1992). *Children's Participation: From Tokenism To Citizenship*. Florence: UNICEF.
- Humas Kota Bandung. (2019, Juli 4). *60 Tahun Sister City, Bakal Ada Jalan Bandung di Braunschweig, Jerman*. Retrieved from Humas Kota Bandung: <http://humas.bandung.go.id/humas/layanan/60-tahun-sister-city-bakal-ada-jalan-bandung-di-br>
- Humas Kota Bandung. (2019, Maret 19). *Wakil Wali Kota Gandeng Pemuda Berperan di Program Sister City*. Retrieved from Humas Kota Bandung: <http://humas.bandung.go.id/humas/layanan/wakil-wali-kota-gandeng-pemuda-berperan-di-program>
- Husna, S. (2018). Kontribusi Deutschclub Bandung Sebagai Citizen Diplomats Dalam Upaya Penguatan Hubungan Sister City Bandung - Braunschweig. *Skripsi(S1) Universitas Pasundan.*
- Kaminski, M. (2020, Maret 6). HBK Braunschweig Students Activities in Bandung. (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1974). Transgovernmental Relations and International Organizations. *World Politics / Volume 27 / Issue 01*, 39-62.
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. New York: SAGE Publications.
- Lestari, G. (2016). Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 22 No 2*, 137-157.
- NST, E. D. (2016). Implementation Cooperation Sister Cityof Bandung And Suwon Years 1997 – 2015. *The 4th University Research Coloquium 2016*, 216-224.
- Pluijm, R. v., & Melissen, J. (2007). *City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*. The Hague: Clingendael.
- Prasajja, L., Saryani, & Muhamad. (2018). Partisipasi Pemuda Pada Wisata Alam Kalibiru. *Sosioglobal Vol. 3 No.1*, 17-26.
- Prasatya, S. T. (2020, Februari 13). Pembentukan Basic Youth Forum. (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)
- Rahayu, A. M. (2017). Bandung Smart City and Sister Cities: Managing the Challenges of Globalisation. *Borderless Communities and Nations with Borders: Challenges of Globalisation*. Yogyakarta: IIFAS and Center for Southeast Asian Social Studies Gadjah Mada University.
- Rizqina, F. (2010). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres Kotamadya Jakarta Barat. *Post Graduate Thesis (S2) Universitas Indonesia*.
- Safi'i, H. (2007). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Sarwono, T. (2020, Februari 13). Kegiatan Basic Youth Forum. (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)
- Schiavon, J. (2019). *Comparative paradiplomacy*. New York: Routledge.
- Sinaga, O. (2010). Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. *Administratur Vol.3 No.3*, 35-53.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Layanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Ghilia Indonesia.
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy Cities and States as Global Players*. New York: Oxford University Press.

- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: cities and states as global players*. Oxford: Oxford University Press.
- Trianto, I. (2020, Maret 11). Basic Youth Forum dan Dinas Pemuda dan Olahraga. (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)
- Umma, M. (2020, Maret 10). Kegiatan Basic Youth Forum. (I. S. Nurrahmadi, Interviewer)
- Windiani, R. (2013). Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Otonomi Daerah. Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 2, no. 1, 76-98.
- Wolff, S. (2007). Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges. *The Bologna Center Journal of International Affairs* 10.1, 141-150.